

I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu wilayah yang kaya akan sumberdaya alam hayati dan non hayati. Salah satu sumberdaya alam hayati tersebut adalah ekosistem mangrove. Keberadaan mangrove ini merupakan ciri khas dari wilayah pesisir yang ada di daerah tropis dan sub tropis. Dari sekitar 16,9 juta ha hutan mangrove yang ada di dunia, sekitar 27 % berada di Indonesia (Bengen, 2002). Data yang didapat dari Ditjen RRL (1999) dalam Fatimah (2012) menyebutkan bahwa luas hutan mangrove Indonesia tinggal 9,2 juta ha (3,7 juta ha dalam kawasan hutan dan 5,5 juta ha di luar kawasan). Menurut Haryani (2013), deforestasi hutan mangrove menyebabkan hutan mangrove dalam kondisi rusak berat mencapai luas 42 %, kondisi rusak mencapai luas 29 %, kondisi baik mencapai luas < 23 % dan kondisinya sangat baik hanya seluas 6 %.

Hutan mangrove merupakan sumberdaya alam yang penting di lingkungan pesisir, dan memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi fisik, biologis, dan ekonomis. Fungsi fisik adalah sebagai penahan angin, penyaring bahan pencemar, penahan ombak, pengendali banjir dan pencegah intrusi air laut ke daratan. Fungsi biologis adalah sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*), daerah asuhan (*nursery ground*), dan sebagai daerah mencari makan (*feeding ground*) bagi ikan serta biota laut lainnya. Fungsi ekonomis adalah sebagai penghasil kayu untuk bahan baku dan bahan bangunan, bahan makanan dan obat-obatan. Selain itu, fungsi tersebut adalah strategis sebagai produsen primer yang mampu mendukung dan menstabilkan ekosistem laut maupun daratan (Romimohtarto dan Juwana, 2001). Sementara Vo *et al.*, (2012) menambahkan bahwa hutan mangrove juga memiliki fungsi ekonomi sebagai tempat obyek pendidikan, wisata dan penelitian.

Besarnya potensi ekosistem mangrove mendorong adanya eksploitasi sumberdaya yang berlebihan sehingga dapat mengancam kelestariannya. Pramudji, (2000) dalam Ritohardoyo dan Ardi (2014) menyebutkan bahwa rusaknya

mangrove bukan saja diakibatkan oleh proses alami, tetapi juga akibat aktivitas manusia. Keberadaan eksploitasi ekosistem mangrove untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang berlebihan dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi akan dapat merusak ekosistem mangrove itu sendiri. Ekosistem mangrove akan mengalami degradasi dan secara langsung kehilangan fungsi-fungsinya. Purnobasuki (2011), menyebutkan bahwa ketidaktahuan masyarakat dan pemerintah akan pentingnya ekosistem mangrove menyebabkan pembangunan dalam rangka pengembangan kawasan ekosistem mangrove menjadi tidak terkontrol sehingga ekosistem mangrove akan menjadi rusak.

Kabupaten Bantul termasuk salah satu wilayah yang memiliki pantai dengan panjang garis pantai \pm 17 km yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Di wilayah pesisir Kabupaten Bantul dapat dijumpai vegetasi mangrove yang tumbuh baik, tepatnya di estuari/pertemuan antara laut selatan dengan muara Sungai Opak. Keberadaan vegetasi mangrove di Dusun Baros ini merupakan inisiasi dari Keluarga Pemuda Pemudi Baros (KP2B) sejak tahun 2003 yang didampingi oleh LSM Relung. Sebelum adanya mangrove, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Dusun Baros adalah banjir, abrasi, intrusi air laut, tsunami dan gangguan angin laut yang dapat merusak tanaman pertanian. Namun sekarang ancaman tersebut sudah banyak berkurang dan seiring berjalannya waktu, ekosistem mangrove di Dusun Baros menjadi salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lautan yang potensial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Dusun Baros baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Keberadaan vegetasi mangrove di Dusun Baros sekarang ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan mangrove Baros.

Sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan biodiversitas di ekosistem mangrove Baros, Pemerintah Daerah melalui Bupati Kabupaten Bantul pada tanggal 28 April 2014 menetapkan ekosistem mangrove Baros sebagai Kawasan Konservasi Mangrove melalui Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 284 Tahun 2014 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir yang terdiri dari tiga zona, yakni zona inti (10 ha), zona lainnya (94 ha) dan zona pemanfaatan terbatas (28 ha). Rincian zonasi yang dimaksud seperti yang tercantum didalam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/Men/2008 adalah sebagai berikut:

1. Zona inti

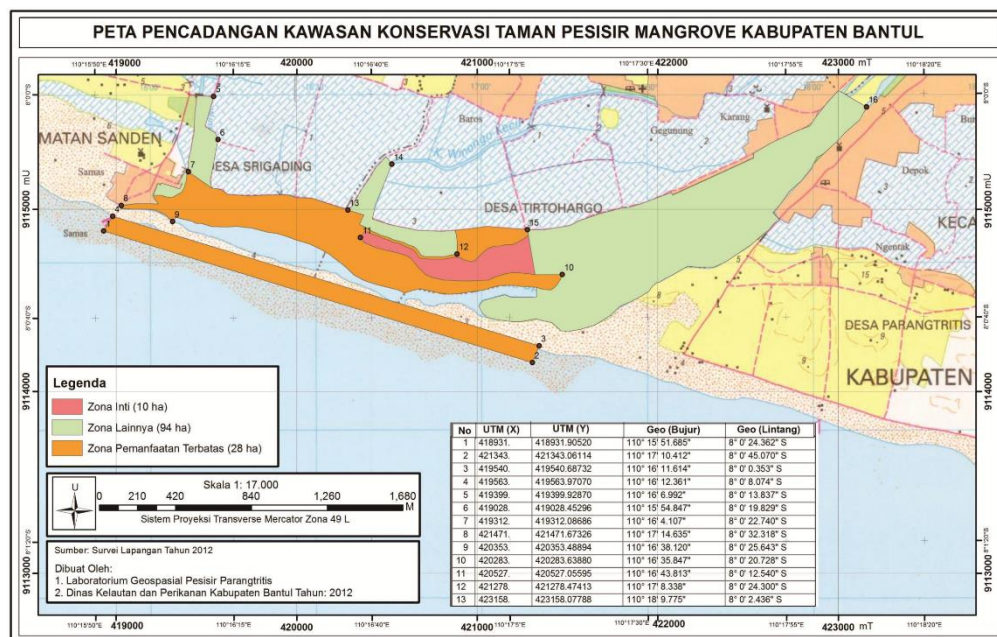
Penetapan sebagai zona inti dikarenakan merupakan daerah tempat berpijah (*spawning ground*), tempat bertelur (*nesting site*), daerah asuhan (*nursery ground*), tempat mencari makan (*feeding ground*) ikan dan/atau biota perairan lainnya serta sebagai ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang unik dan rentan terhadap perubahan.

2. Zona pemanfaatan terbatas

Merupakan wilayah untuk perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan serta pendidikan.

3. Zona lainnya

Adalah zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu antara lain zona rehabilitasi.



Gambar 1. Peta Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Mangrove Kabupaten Bantul

Dengan ditetapkannya mangrove di Dusun Baros sebagai Pencadangan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Kabupaten Bantul menguatkan posisi mangrove Baros sebagai kawasan konservasi yang perlu dilindungi dengan semua fungsi dan manfaatnya baik fisik, biologis maupun ekonomis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar mangrove Baros. Sampai saat ini perkembangan mangrove Baros dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari penambahan luas tutupan lahan maupun sarana prasarana pendukungnya. Disebutkan oleh Cahyawati (2013) bahwa tahun 2012 vegetasi mangrove di Dusun Baros seluas 3,5 ha dan terus berkembang menjadi 7 ha di Tahun 2017 (Desa Tirtohargo, 2017).

Perkembangan mangrove Baros membuat banyak pihak memberikan dukungan untuk ikut serta mengembangkan kawasan konservasi mangrove tersebut. Selain faktor alam dan banyaknya sampah yang ada di mangrove Baros, pengelolaan dan pengembangan mangrove Baros tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi, antara lain (i) belum adanya *blue print* rencana jangka panjang pengembangan mangrove Baros sebagai kawasan konservasi yang secara mendetail sehingga rawan terjadi kesalahan arah pengembangan, (ii) terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan didalam pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan bahwa untuk Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) terutama pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil adalah kewenangan provinsi. Artinya, kewenangan dan pengelolaan mangrove Baros beralih dari Pemerintah Kabupaten Bantul ke Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, (iii) kurangnya sinkronisasi antar instansi pemerintah, sehingga bantuan pemerintah seringkali sama pada tahun anggaran yang sama.

Adanya program-program kegiatan dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari pihak swasta dalam rangka pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove Baros tentunya membutuhkan ruang-ruang baru untuk merealisasikannya. Program-program pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi mangrove yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis justru akan merusak keberadaan mangrove dan hal ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri di masa mendatang. Kalitouw (2015) menyebutkan bahwa

ekosistem mangrove sangat rentan terhadap kerusakan apabila kurang bijaksana dalam mempertahankan, melestarikan dan mengelolanya.

Kerusakan yang biasanya dialami ekosistem mangrove disebabkan oleh kegiatan manusia secara langsung dalam pemanfaatan ekosistem tersebut seperti memotong, membongkar dan sebagainya dan dapat juga sebagai akibat yang tidak langsung seperti perubahan salinitas air, pencemaran air, karena adanya erosi, pencemaran minyak, banjir yang membawa sampah dan sebagainya. Untuk menghindari permasalahan tersebut diperlukan penilaian pemanfaatan ekosistem mangrove di Dusun Baros, tidak hanya manfaat secara ekonomi tetapi juga pertimbangan manfaat ekologi. Penilaian (valuasi) ekonomi sangat diperlukan manakala dihadapkan pada pilihan antara “pembangunan” dan “konservasi lingkungan” dimana dalam kehidupan sehari-hari, acapkali ”pembangunan” diberi ’nilai’ lebih tinggi dibandingkan ”konservasi lingkungan” dengan alasan misalnya pembangunan bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan (Irham, 2007). Valuasi ekonomi sumberdaya alam merupakan suatu alat ekonomi (*economic tool*) sebagai upaya untuk melihat manfaat dan biaya dari sumberdaya dalam bentuk moneter yang mempertimbangkan lingkungan (Saprudin dan Halidah, 2012). Pemahaman konsep ini memungkinkan para pengambil kebijakan untuk mengelola sekaligus menggunakan berbagai sumberdaya alam dan lingkungan pada tingkat yang paling efektif dan efisien serta mampu mendistribusikan manfaat dan biaya konservasi secara adil (Rachmansyah dan Maryono, 2010). Disamping itu valuasi ekonomi penting dalam peningkatan penghargaan dan kesadaran masyarakat terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan yang dalam hal ini adalah ekosistem mangrove di Dusun Baros.

1. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi dan status vegetasi mangrove di ekosistem mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul?
2. Berapa nilai ekonomi total dari ekosistem mangrove di ekosistem mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul?
3. Bagaimana strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan di ekosistem mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi dan status vegetasi mangrove di ekosistem mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul.
2. Mengetahui nilai ekonomi total dari ekosistem mangrove di ekosistem mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul.
3. Merumuskan strategi pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan di ekosistem mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul.

1. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi masyarakat dan akademisi yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait valuasi ekonomi ekosistem mangrove Baros sebagai salah satu bentuk upaya konservasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY)

dalam perencanaan, pengelolaan serta pengembangan sumberdaya ekosistem mangrove Baros yang berkelanjutan.

1. 5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang valuasi ekonomi hutan mangrove sudah pernah dilakukan. Suzana *et al* (2011) melakukan penelitian tentang Valuasi Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove di Desa Palaes Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan penilaian ekonomi terhadap ekosistem hutan mangrove, serta kontribusinya terhadap masyarakat di wilayah lokasi penelitian mangrove di Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. Penghitungan nilai ekonomi dilakukan dengan pendekatan fungsi dan manfaat dari hutan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomi total hutan mangrove di Desa Palaes sebesar Rp. 10.888.218.123,- /tahun, yang dihitung dari manfaat langsung (Rp. 175.293.000,- /tahun), manfaat tidak langsung (Rp. 10.671.627.483,- /tahun) dan manfaat pilihan (Rp.41.297.640,- /tahun).

Penelitian mengenai *Economic Analysis of Mangrove Forests : A case study in Gazi Bay, Kenya* pernah dilakukan oleh UNEP (2011). Pendekatan yang digunakan yaitu nilai pasar untuk menilai manfaat langsung, sedangkan *Damaged Cost Avoided* digunakan untuk menilai fungsi mangrove sebagai pelindung pantai dan metode Benefit Transfer digunakan untuk menilai biodiversitas serta nilai keberadaan. Penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan nilai guna tidak langsung yang terdiri dari perlindungan pantai, penyerap emisi karbon dan biodiversitas menyumbang 25 % dari *Total Economic Value* (TEV). Nilai keberadaan menyumbang 55 % dari *Total Economic Value*. Hasil analisis TEV adalah sebesar US\$ 1,092/ha/tahun.

Siregar (2012) dalam penelitiannya Valuasi Ekonomi dan Analisis Strategi Konservasi Hutan Mangrove di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Teknik perhitungan nilai manfaat ekosistem mangrove dengan pendekatan nilai total ekonomi adalah pendekatan produksi dan nilai pasar (*productivity and market values*), pendekatan biaya ganti (*replacement cost*), dan *contingent valuation*

method (CVM) dengan memanfaatkan data hipotetik mengenai kesediaan membayar (*Willingness To Pay/WTP*) dari pengguna sumberdaya ekosistem hutan mangrove. Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwa manfaat yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan dan manfaat keberadaan. Masih terdapat pemanfaatan kawasan atau pemanfaatan hasil hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk meningkatkan nilai manfaat mangrove saat ini di Kabupaten Kubu Raya maka strategi pengelolaan yang harus dilakukan dengan diversifikasi manfaat pada kawasan hutan lindung (pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu), efisiensi biaya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, penerapan sistem silvikultur hutan mangrove yang sesuai, dan penerapan kriteria dan indikator pengelolaan hutan mangrove lestari. Hasil kayu ternyata hanya memberikan kontribusi sekitar 11,6 % dari total nilai manfaat yang diberikan pertahunnya. Dengan kondisi ini, maka pengelolaan ekosistem mangrove di Kubu Raya harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kehati-hatian, serta memperhatikan kriteria dan indikator pengelolaan hutan yang lestari.

Haridhira (2012) melakukan penelitian tentang Valuasi Nilai Ekonomi Total Kawasan Hutan Mangrove “Taman Hutan Raya Ngurah Rai” di Sepanjang Teluk Benoa, Provinsi Bali. Metode pendekatan untuk menjawab perumusan masalah yaitu Nilai Ekonomi Total dengan menggunakan berbagai teknik valuasi lingkungan dan hasil penelitian yang diperoleh adalah nilai manfaat langsung kawasan hutan mangrove diperoleh sebesar Rp. 3.521.236.924,-/tahun dan nilai ekonomi total kawasan hutan mangrove Benoa adalah sebesar Rp. 9.634.886.210,32 /tahun atau Rp. 7.014.842,53/ha/tahun.

Penelitian dengan mengambil judul Valuasi Ekonomi Sumber Daya Mangrove di Dusun Baros Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul pernah dilakukan oleh Trialfhianty (2014). Tujuan penelitian ini adalah menghitung total nilai ekonomi ekosistem mangrove Baros, Kretek, Bantul. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai total manfaat ekonomi di dalam kawasan mangrove adalah sebesar Rp. 168.744.141,67/ha/tahun, yang terdiri atas nilai manfaat langsung sebesar Rp. 19.756.491,67/ha/tahun, nilai manfaat tidak langsung sebesar

Rp. 132.017.160,00/ha/tahun, nilai pilihan sebesar Rp. 170.490,00/ ha/tahun dan nilai keberadaan sebesar Rp. 16.800.000,00/ha/tahun.

Waty dan Ulfah (2014), melakukan penelitian tentang Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Pulau Dompok Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk mengetahui manfaat dan nilai ekonomi ekosistem hutan mangrove, Mengkuantifikasi total nilai pemanfaatan (*use value*) dan nilai bukan pemanfaatan (*non-use value*) ekosistem hutan mangrove dan Merumuskan strategi pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek fungsi dan peran mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat ekosistem hutan mangrove di Pulau Dompok terdiri dari manfaat langsung berupa hasil hutan (kayu log), penangkapan ikan, kepiting, udang dan siput laut (gonggong). Manfaat tidak langsung berupa penahan abrasi dan manfaat pilihan berupa nilai keanekaragaman hayati. Metode yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomi ekosistem hutan mangrove adalah dengan pendekatan Nilai Ekonomi Total (*Total Economic Value*). Nilai manfaat ekonomi total hutan mangrove di Pulau Dompok adalah sebesar Rp. 88.257.253.176,20/tahun atau sebesar Rp. 169.725.486,88/ha/tahun yang terdiri nilai manfaat langsung sebesar Rp. 53,131,453,176.20/tahun (60,20 %). Nilai manfaat tidak langsung diperoleh sebesar Rp 35,040,000,000,- (39,70 %) dan nilai manfaat pilihan sebesar Rp. 85,800,000,- (0,10 %). Strategi pengelolaan ekosistem yang dirumuskan adalah dengan menjaga fungsi dan peranan ekosistem mangrove melalui pengembangan ekowisata mangrove, mata pencaharian alternatif bagi nelayan atau wanita nelayan, alternatif potensi pemanfaatan hutan mangrove seperti pemanfaatan buah mangrove, penerapan peraturan tentang pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove, dengan pengawasan yang ketat baik oleh pihak pengelola maupun dengan partisipasi masyarakat setempat.

Valuasi Ekonomi Sumberdaya Mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang pernah dilakukan oleh Desti *et al* (2016). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pemanfaatan sumberdaya mangrove, menganalisis valuasi ekonomi total (TEV) sumberdaya mangrove setelah dikonversi menjadi tambak, dan menganalisis nilai manfaat sumberdaya mangrove. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan sumberdaya mangrove yang

dilakukan masyarakat lokal: perikanan tangkap ikan belanak, perikanan budidaya/tambak ikan bandeng dan udang windu, pembibitan mangrove, dan buah mangrove. Nilai ekonomi total sumberdaya mangrove di Kelurahan Mangunharjo saat ini seluas 7,1 ha ekosistem mangrove dan 75 ha tambak produktif sebesar Rp. 1.398.787.140,- /tahun atau Rp. 160.480.161,- /ha/tahun. Nilai manfaat sumberdaya mangrove yang tertinggi yaitu manfaat tidak langsung 63,77 % (Rp. 892.000.000,- /tahun atau Rp. 125.633.803,- /ha/tahun), nilai manfaat lainnya adalah manfaat langsung 33,30 % (Rp. 465.739.500,- /tahun atau Rp. 29.065.000 /ha/tahun), manfaat keberadaan 2,87 % (Rp. 40.136.000,- /tahun atau Rp. 5.652.958 /ha/tahun), dan manfaat pilihan 0,07 % (Rp. 911.640,- /tahun atau Rp. 128.400,- /ha /tahun).

Penelitian terdahulu mengenai valuasi ekonomi ekosistem mangrove telah banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan nilai ekonomi total yang menghitung nilai manfaatnya. Adapun satu penelitian terdahulu yang berlokasi di mangrove Baros hanya menghitung nilai ekonomi total berdasarkan nilai pemanfaatan (*use value*) dan nilai non pemanfaatan (*non use value*). Penelitian tersebut tidak membahas strategi pengelolaannya. Roadmap penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1 di bawah ini.

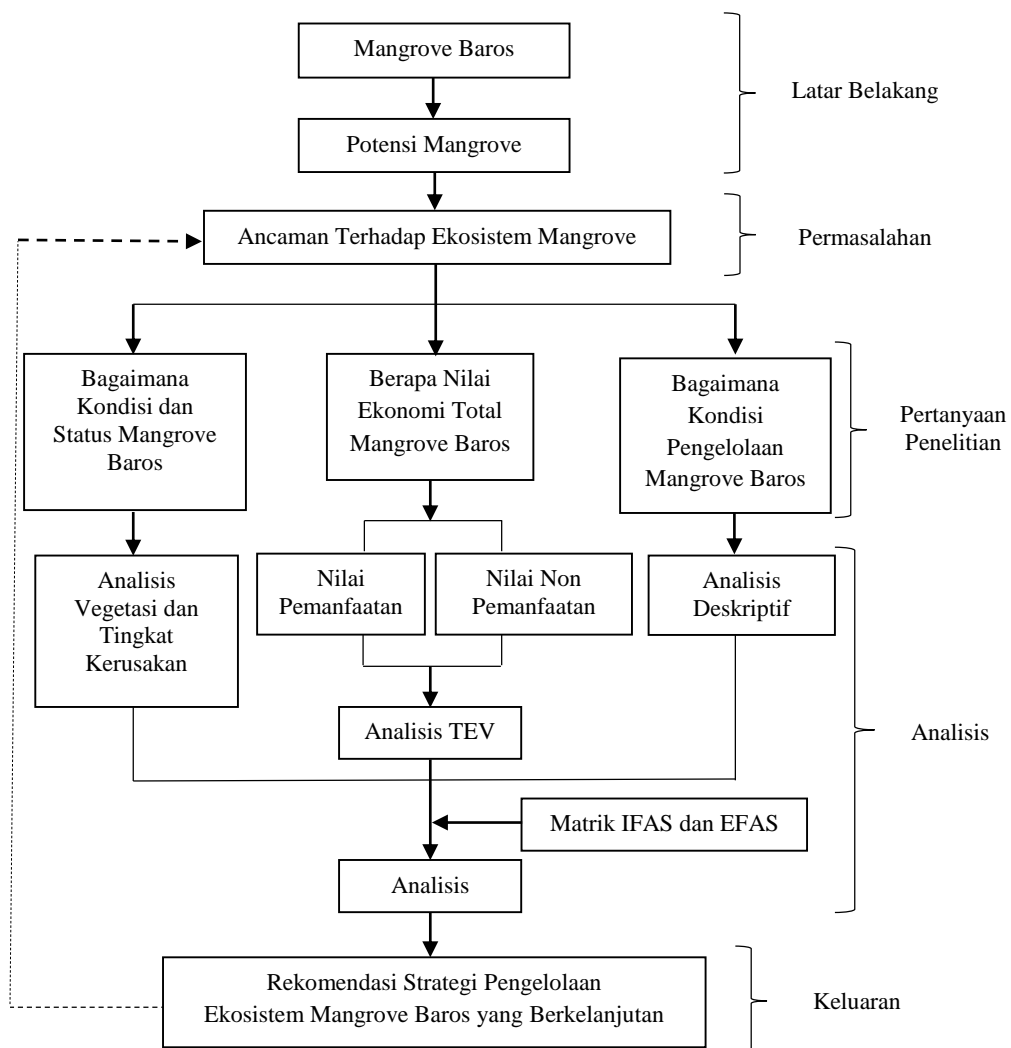
Tabel 1. Penelitian terdahulu mengenai valuasi ekonomi mangrove

No	Nama	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian
1	Suzana <i>et al</i> (2011)	Valuasi Ekonomi Sumberdaya Hutan Mangrove di Desa Palaes Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara	Melakukan penilaian ekonomi terhadap ekosistem hutan mangrove, serta kontribusinya terhadap masyarakat di wilayah lokasi penelitian mangrove di Desa Palaes, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara.
2	UNEP (2011)	<i>Economic Analysis of Mangrove Forests : A case study in Gazi Bay, Kenya</i>	Menganalisa nilai ekonomi hutan mangrove di Gazi Bay, Kenya berdasarkan nilai fungsi yang diberikan oleh hutan mangrove di wilayah tersebut.
3.	Siregar (2012)	Valuasi Ekonomi dan Analisis Strategi Konservasi Hutan Mangrove di Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat	Melakukan valuasi ekonomi pada hutan mangrove seluas 84.843,08 ha di Kabupaten Kubu Raya guna merumuskan analisis strategi konservasinya.

No	Nama	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian
4.	Haridhira (2012)	Valuasi Nilai Ekonomi Total Kawasan Hutan Mangrove “Taman Hutan Raya Ngurah Rai” di Sepanjang Teluk Benoa, Provinsi Bali	Memberikan informasi tentang peran penting keberadaan ekosistem mangrove bagi kehidupan manusia serta mengkuantifikasikan manfaat-manfaat yang disediakan oleh ekosistem ini berdasarkan konsep Nilai Ekonomi Total dengan menggunakan berbagai teknik valuasi lingkungan.
5.	Trialfhianty (2014)	Valuasi Ekonomi Sumber Daya Mangrove di Dusun Baros Desa Tirtoharjo Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.	Mengkuantifikasi nilai ekonomi sumber daya mangrove di Dusun Baros, Desa Tirtoharjo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul.
6.	Waty dan Ulfah (2014)	Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove di Pulau Dompok Kota Tanjungpinang Propinsi Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui manfaat dan nilai ekonomi ekosistem hutan mangrove di Pulau Dompok 2. Mengkuantifikasi total nilai pemanfaatan (<i>use value</i>), nilai non pemanfaatan (<i>non-use value</i>), dan nilai keberadaan ekosistem hutan mangrove. 3. Merumuskan strategi pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek fungsi dan peran mangrove.
7.	Setiyowati, Supriharyono dan Triarso (2016)	Valuasi Ekonomi Sumberdaya Mangrove di Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pemanfaatan sumberdaya mangrove oleh masyarakat lokal di Kelurahan Mangunharjo. 2. Menganalisis valuasi ekonomi total (TEV) dari sumberdaya mangrove setelah dikonversi menjadi tambak di Kelurahan Mangunharjo. 3. Menganalisis nilai manfaat dari sumberdaya mangrove di Kelurahan Mangunharjo.

1. 6. Kerangka Pikir Penelitian

Keberadaan ekosistem mangrove mempunyai fungsi dan manfaat yang besar terhadap kelestarian lingkungan pesisir disekitarnya. Mangrove Baros keberadaannya sangat penting bagi masyarakat di Dusun Baros, Tirtoharjo, Kretek, Bantul yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sekaligus merangkap sebagai nelayan dan peternak karena dapat melindungi lahan pertanian dari intrusi air laut, banjir, sebagai penahan angin laut serta sebagai tempat mencari ikan dan kepiting. Disamping itu mangrove Baros telah menjadi salah satu ikon wisata minat khusus (konservasi) Kabupaten Bantul dan dalam perkembangannya justru menjadikan rentan terhadap kerusakan.



Gambar 2. Kerangka pikir penelitian valuasi ekonomi ekosistem mangrove di Dusun Baros, Desa Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul

Suatu penelitian yang mengkaji kondisi dan menghitung nilai ekonomi dari ekosistem mangrove Baros sangat diperlukan sehingga didapatkan nilai manfaatnya. Disamping itu dilakukan juga analisis strategi pengelolaan dengan menggunakan metode SWOT sehingga diharapkan dapat dicapai pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan dan memberikan manfaat secara ekologis dan ekonomis bagi masyarakat di sekitar kawasan mangrove di Dusun Baros. Secara skematis alur penelitian ini tersaji pada Gambar 2 diatas ini.